



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR HARTANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **405693**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/200 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Tanah Seluas 700 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **146.230.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA LSSV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FK 110 D Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000
3. MOTOR, SUZUKI FD 110 2PM SOLO Tahun 1997, WARISAN Rp. 1.400.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.900.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.830.000
6. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **88.122.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **83.285.748**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.367.637.748**

III. HUTANG Rp. **---**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.367.637.748

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.